

Akuntabilitas Dan Transparansi Dana BOS: Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi

Aisyah Fithri Musfirah*

aisyahmusfirah316@gmail.com

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Nurlaila

nurlaila@uinsu.ac.id

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Yenni Samri Juliati Nasution

yenni.samri@uinsu.ac.id

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki praktik pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi, dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan kepek, bendahara dana BOS, dan guru di sekolah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran yang kuat dari semua pihak akan pentingnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan teknologi, kesiapan SDM, dan koordinasi dengan pihak eksternal. Solusi potensial diidentifikasi dalam penerapan sistem informasi akuntansi, tetapi diperlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, sekolah ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pendidikan di lingkungan mereka.

Kata Kunci Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Informasi Akuntansi

I. PENDAHULUAN

Pendidikan ialah kebutuhan manusia yang sangat berarti sebab pendidikan memiliki tugas buat mempersiapkan SDM untuk pembangunan bangsa serta negara. Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK) menyebabkan pergantian serta perkembangan untuk lebih terlibat. Perihal ini memunculkan masalah- masalah sosial serta tuntutan- tuntutan baru yang tidak bisa diprediksi lebih dahulu, sehingga pembelajaran senantiasa mengalami permasalahan sebab terdapatnya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang bisa dicapai dari proses pendidikan. (Hidayat et al., 2019).

Akuntabilitas serta transparansi ialah perihal yang berarti dalam mengelola suatu organisasi. Akuntabilitas serta transparansi ialah perihal yang silih terpaut sebab penerapan akuntabilitas memerlukan transparansi. (Andreani et al., 2022). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah

aspek krusial dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Dalam era di mana teknologi informasi menjadi landasan utama untuk efisiensi, penerapan sistem informasi akuntansi menjadi suatu keharusan untuk memperkuat kedua prinsip ini. (Permata, 2023).

Merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus. Pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pendidikan khusus didefinisikan sebagai jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 (1) Undang-Undang tersebut menyatakan Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang mempunyai ketidakmampuan belajar karena cacat fisik, emosional, mental atau sosial dan/atau yang mempunyai kecerdasan atau kemampuan khusus.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan setiap pengelolaan dana pendidikan harus didasari oleh asas pemerataan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Semua lembaga pendidikan wajib mengelola sumber daya pendidikannya dengan sebaik mungkin dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Lembaga pendidikan diharuskan memiliki seluruh catatan kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman pendidikan dari perencanaan hingga dan menyiapkan laporan evaluasi dan pertanggungjawaban bagi pihak yang terlibat dalam pinjaman tersebut.

Dalam upaya mencapai keberhasilan pendidikan pada anak-anak berkebutuhan khusus, maka biaya pendidikan menjadi aspek yang tidak dapat dihiraukan. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa satuan biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan beasiswa. Biaya pendidikan berasal dari berbagai sumber, seperti sumbangan, sektor swasta, orang tua siswa, mem, dan pemerintah daerah. Memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia adalah salah satu tanggung jawab negara. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor I Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah).

Biar sekolah dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik kepada partisipan didik, pemerintah memberikan dorongan yakni dengan menyelenggarakan program dalam bentuk hibah yang sehabis itu diucap sebagai Dana Bantuan Operasional Sekolah. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah dana yang digunakan sangat utama buat mendanai belanja nonpersonalia buat satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan buat mendanai sebagian kegiatan lain cocok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021

Sekolah yang mendapat dana BOS mempunyai sumber daya yang lebih besar untuk menyelenggarakan pendidikan guna mendanai pemeliharaan dan setiap sarana prasarana. Tercapainya tujuan yang diharapkan dari program pemerintah ini tidak lepas dari bantuan pengelola keuangan sekolah. Sekolah-sekolah harus mampu mengelola Pendanaan BOS disediakan oleh pemerintah secara independen melalui manajemen berbasis sekolah (MBS). Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan menjadi wewenang dari MBS agar berjalan dengan baik dan transparan sesuai dengan UU Pengelolaan Sekolah yang tertuang dalam menerbitkan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah diterbitkan pemerintah

setiap tahunnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan.

Jadi secara biasanya Bantuan operasional sekolah maupun BOS ialah Bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah guna kepentingan nonpersonalia. Dana BOS diberikan bersumber pada jumlah siswa yang dipunyai sesuatu sekolah. Disaat ini, dana BOS dipecah jadi 2, yakni BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan dana BOS yang berasal dari pemerintah wilayah. Buat tingkatan kualitas sekolah, komponen pelaksana aktivitas belajar mengajar wajib sanggup merancang, melakukan, serta mempertanggungjawabkan pemakaian sumber energi BOS. Petunjuk Teknis Pemakaian Dana BOS dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, departemen teknis yang bertanggung jawab atas penerapan serta pengelolaan program BOS. Petunjuk Teknis mengendalikan metode pemakaian dana BOS di UPT SLB- E Negara Pembina Tingkatan Provinsi.

Dana BOS telah menjadi instrumen vital dalam menyokong kebutuhan operasional sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Namun, keberhasilannya dalam mencapai tujuan pendidikan tergantung pada pengelolaan yang efisien dan akuntabel. Penerapan sistem informasi akuntansi dianggap sebagai kunci untuk mencapai tujuan ini. (Rosdiana, 2021). Selain memperkuat akuntabilitas, penerapan sistem informasi akuntansi juga dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan Dana BOS. Dengan adanya rekam jejak yang jelas, informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana dapat diakses oleh berbagai pihak terkait, seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum. (Agustini et al., 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan Dana BOS dapat meningkatkan efisiensi administrasi keuangan di sekolah. Proses pembukuan yang otomatis dan terstruktur membantu Mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk tugas pengelolaan. (Rosdiana, 2021). Namun, tantangan dalam implementasi sistem informasi akuntansi juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi ini. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi pengelola sekolah menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi ini. Sebagai kesimpulan, penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan Dana BOS merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. Melalui upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, diharapkan transformasi dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sistem pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih baik (Hakiki et al., 2021).

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dapat menjadi kunci. Program pelatihan dan dukungan teknis yang diselenggarakan bersama dapat memperkuat kapasitas pengelola sekolah dalam menerapkan sia secara efektif. (Santosa, 2021). Penerapan sia dalam mengelola Dana BOS tidak hanya merupakan langkah teknis semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Melalui transformasi ini, diharapkan terciptanya sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Terlepas dari semua upaya yang dilakukan, evaluasi berkala terhadap implementasi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan Dana BOS menjadi penting. Dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus, dapat diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem. (Sukomardojo et al., 2023). Dengan demikian, penting untuk terus mendorong inovasi dan pembaruan dalam pengelolaan

Dana BOS, termasuk melalui penerapan teknologi informasi. Melalui sinergi antara kebijakan publik, dukungan teknis, dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, visi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dapat terwujud (Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dana BOS masih perlu ditingkatkan yang mana (Supriyanto, 2022) menemukan bahwa masih terdapat sekolah belum memiliki sistem pencatatan yang baik dan belum secara rutin melaporkan penggunaan dana BOS kepada pihak berkepentingan. Hal ini menyebabkan rendahnya variabel yang terkait dalam pengelolaan dana BOS. Penerapan sistem informasi akuntansi dianggap sebagai tonggak penting dalam mengubah paradigma pengelolaan dana BOS. Integrasi teknologi informasi dalam manajemen keuangan sekolah diharapkan dapat membuka pintu bagi transparansi yang lebih besar serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik ini. (Supriyanto, 2022).

SIA ialah sistem yang mengoleksi, mencatat, menaruh, serta memproses informasi sehingga menciptakan data untuk pengambil keputusan. (TMBooks, 2017). Secara totalitas sistem informasi akuntansi berfungsi penting dari semenjak pencatatan sampai gimana sistem tersebut menciptakan data yang bermutu. Sebab pada dasarnya, suatu sistem data akuntansi dievaluasi bersumber pada output berbentuk data yang dihasilkan serta akibat yang diberikan. Di sisi lain ada suatu sistem pengawasan spesial yang diketahui dengan sebutan Akuntansi Pertanggungjawaban. Disebutkan selaku sesuatu pengendalian yang spesial, sebab akuntansi pertanggungjawaban cuma memegang kendali spesial pada satu pusat pertanggungjawaban saja. Buat sanggup melaksanakan pengendalian ataupun pengawasan yang baik secara universal, hingga pengendalian ataupun pengawasan yang secara spesial wajib dicoba secara baik. (Koloay, 2015).

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap dampak penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, upaya hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti guna merancang langkah- langkah strategis yang akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di Indonesia Ruang lingkup penelitian ini akan fokus pada pengelolaan dana BOS di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi dan bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Hal ini terlihat dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada Desember 2023 dengan mewawancarai bendahara dana bos, mengenai pengelolaan Dana BOS di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi, sampai pada saat itu mereka belum menerapkan sistem informasi akuntansi. Dalam kasus ini, pertanyaan bagi para peneliti adalah mengapa hal ini bisa terjadi. Bagaimana tingkat akuntabilitas saat ini terhadap penggunaan dana BOS di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi? Apakah proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS sudah optimal, atau masih terdapat kekurangan dan ketidakpastian? Sejauh mana informasi mengenai penggunaan dana BOS dapat diakses dan dipahami oleh berbagai pihak terkait, termasuk pihak sekolah dan orang tua siswa? Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS? Apakah pihak UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi masih mengandalkan proses manual dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS? Apakah keterbatasan sistem manual tersebut mempengaruhi akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan dana.

II. LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan wujud keharusan seseorang (pimpinan/ pejabat/ pelaksana) buat menjamin kalau tugas serta kewajiban yang diembannya telah dilaksanakan cocok syarat yang berlaku. (Sujarweni, 2015). Secara universal, akuntansi merupakan sesuatu sistem buat menciptakan data keuangan yang digunakan oleh para penggunanya buat mengambil keputusan bisnis. Tujuannya buat mencatat, memberi tahu, menginterpretasikan informasi keuangan buat digunakan dalam pengambilan keputusan. (Harmain et.al., 2019). Akuntabilitas ialah ketentuan bawah buat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan buat membenarkan bahwasanya kekuasaan ditunjukan buat menggapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, energi guna, kejujuran dan kebijaksanaan sangat tinggi. (Batubara, 2022)

Akuntabilitas (accountability) yakni konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara murah dan efisien tanpa dibebani kewajiban buat berikan ketahui, kebalikannya accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Terwujudnya akuntabilitas yakni tujuan utama dari reformasi zona publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga- lembaga zona publik buat lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) ialah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih besar bukan hanya pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) ialah pertanggungjawaban kepada warga luas. Tuntutan yang sehabis itu mencuat ialah kebutuhan akan laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga zona public (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas yakni bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa dan buat apa organisasi bertanggung jawab. Bersumber pada sebagian pendapat tersebut, dapat disimpulkan jika akuntabilitas merujuk pada kewajiban masing- masing orang maupun kelompok dalam suatu institusi buat memenuhi tanggung jawab yang jadi amanahnya, yakni menjamin terwujudnya nilai- nilai publik. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari gimana pengelola bertanggungjawab dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Pengelola dituntut buat melakukan pencatatan keuangan secara akuntabel dengan mempraktikkan akuntansi organisasi nirlaba. Akuntan nirlaba adalah akuntan yang ahli dalam mencatat dan melaporkan permasalahan instansi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya, termasuk masjid yang merupakan lembaga keagamaan. bMengenai ini bertujuan biar pengelola dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya, tingkatkan efesiensi dan energi guna kinerja dan dapat menjauhi penyalahgunaan kekuasaan. Melakukan pencatatan secara akuntabel pula dibutuhkan buat mempertahankan kepercayaan jama' ah kepada pengelola keuangan (Rahma et al., 2023).

Transparansi

Dalam KBBi transparansi// trans- pa- ran- si// n Mengenai tembus sinar; nyata; jelas. Dengan demikian, secara universal, transparansi bagi KBBi mencakup aspek keterbukaan, kejelasan, serta ketegasan dalam bermacam konteks, baik dalam penyajian data ataupun dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi, ialah keterbukaan dalam penerapan proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam penyampaian data material serta relevan yang berkaitan dengan industry (Batubara, 2022). Transparansi pengelolaan keuangan lembaga pembelajaran ialah pengungkapan sumber dana serta jumlahnya, rincian mengkonsumsi serta pelaporannya wajib jelas sehingga me`udahkan seluruh pihak yang berkepentingan mengetahuinya. Dalam Permendikbud Nomor 18

Tahun 2019 sekolah harus menerbitkan informasi lengkap dokumen secara transparan dengan bertanggung jawab atas pengelolaan program serta mengkonsumsi BOS reguler. Dokumen yang wajib diterbitkan sekolah antara lain realisasi mengkonsumsi dana dari tiap- masing- masing sumber keuangan serta ringkasan realisasi mengkonsumsi dana. Laporan tersebut terbuat universal dengan memasangnya di papan buletin/ data sekolah ataupun tempat lain yang gampang diakses oleh universal (Dalimunthe, 2021).

Sistem Informasi Akuntansi

Tidak diragukan kalau peranan Sistem data Akuntansi berfungsi berarti terhadap kemajuan organisasi. Berkembangnya teknologi data jadi pendukung berkembangnya Sistem Data Akuntansi serta jadi bagian berarti didalam Akuntansi sehingga secara erat sanggup dikoordinasikan jadi transformasi informasi keuangan jadi data yang diperlukan pada sesuatu organisasi (Harahap et al., 2015). Sebagaimana ditunjukkan oleh Statment Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015 tujuan dari laporan keuangan merupakan buat membagikan informasi tentang posisi keuangan, pelaksanaan keuangan, dan arus kas entitas yang berharga buat sebagian besar pengguna laporan dalam menuntaskan opsi keuangan (Syabri et al., 2022).

Langkah pertama yang harus dikerjakan untuk menyelenggarakan akuntansi adalah merancang sistem informasi akuntansi yang akan diterapkan oleh perusahaan. Pada dasarnya, sistem informasi akuntansi ialah sesuatu kesatuan dari bermacam subsistem yang terdiri dari serangkaian prosedur penerapan aktivitas pengumpulan serta pengolahan informasi akuntansi sehingga dihasilkan data akuntansi yang relevan, berguna untuk pihak- pihak yang berkepentingan dengan eksistensi dari sesuatu organisasi ataupun industri. Secara garis besar, sistem informasi akuntansi demikian itu dapat dibedakan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Akuntansi dalam Arti Luas, yaitu SIA yang dirancang dengan maksud untuk dapat memberikan informasi baik yang diperlukan oleh pihak eksternal, yaitu Laporan Keuangan, maupun pihak internal atau manajemen untuk dapat dipakai sebagai dasar.: (a) membuat atau menyusun perencanaan, keputusan dan pengendalian operasi perusahaan sehari-hari, (b) mengamankan harta milik perusahaan, dan (c) mengikuti perkembangan atau pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Sistem Informasi Akuntansi yang Pokok, yaitu SIA yang dirancang dengan maksud untuk memberikan informasi guna memberikan kebutuhan partisipan eksternal atau Laporan Keuangan. Sistem informasi akuntansi yang pokok, pada dasarnya berupa rancangan tentang formulir atau dokumen dan alat-alat pencatatan yang akan dipakai sebagai alat pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, mengenai transaksi-transaksi yang terjadi sampai menjadi laporan keuangan. Jadi, sistem informasi akuntansi yang pokok meliputi: 1) Dokumen sumber (source document), merupakan dokumen/bukti pendukung terjadinya transaksi yang berperan sebagai alat pengumpulan data transaksi yang terjadi seperti Bukti Kas Masuk, Bukti Kas Keluar, Faktur Penjualan Bukti Penerimaan Barang. 2) Susunan dan Kode Rekening Pembukuan, merupakan alat pencatatan transaksi itu yang sekaligus berperan sebagai sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. 3) Buku Jurnal, merupakan alat pencatatan yang berfungsi sebagai buku catatan pertama atas transaksi-transaksi yang terjadi. Buku jurnal sekaligus merupakan media atas dasar mana transaksi-transaksi itu digolongkan dan diidentifikasi pengaruh atau efeknya terhadap elemen-elemen laporan keuangan (Asel Liabilitas atau Utang, Ekuitas atau Modal, Pendapatan, Biaya, Untung, dan Rugi. 4) Neraca Sisa, merupakan daftar saldo dari akun pembukuan yang berfungsi sebagai alat untuk menguji keakuratan dan

kebenaran mekanisme pencatatan, dan sekaligus sebagai bentuk dokumentasi tahap awal/persiapan penyusunan laporan keuangan. 5) Laporan Keuangan, meliputi Laporan Laba-Rugi dan Pendapatan Komprehensi Lain, Laporan Perubahan Ekuitas atau Modal, Laporan Posisi Keuangan atau Neraca, dan Laporan Arus Kas. (Harnanto, 2019).

Sistem informasi akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi yang didesain untuk menghasi penjelasan akuntansi yang berkualitas untuk pengambilan keputusan bagi para penggunanya (Damayanti, 2023). Sistem informasi akuntansi adalah solusi yang tepat dalam menangani permasalahan dalam proses bisnis perusahaan. Penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi ditujukan untuk mendukung proses bisnis perusahaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta agar perusahaan dapat menyebarkan informasi akuntansi/keuangan di setiap lini manajemen perusahaan. (Harahap, 2021). Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem data yang menanggulangi seluruh suatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Akuntansi sendiri sesungguhnya merupakan suatu sistem data. Guna berarti yang dibangun SIA pada suatu organisasi antara lain: Mengumpulkan serta menaruh informasi tentang kegiatan serta transaksi, memproses informasi jadi into data yang bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan, Melaksanakan kontrol secara pas terhadap peninggalan organisasi. Hal- hal yang butuh dicermati dalam menekuni SIA merupakan gimana membuat sistem data akuntansi yang efisien serta efektif sehingga data bermanfaat untuk pengambilan keputusan serta menjamin kebenaran, keakuratan serta ketepatan data yang disajikan. (Putri et al., 2023). Sistem Informasi Akuntansi (SIA) ialah sistem yang dirancang untuk mengoleksi, mengabadikan, mengadaptasi, dan menyampaikan informasi keuangan yang relevan bagi entitas bisnis atau organisasi. SIA bertujuan untuk mendukung proses akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan berguna untuk pengambilan keputusan. (Rochendi et al., 2022).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi yang beralamat di Jalan Guru Sinumba No. 5, Helvetia Tim., Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan ditahun 2024. Asas penyelidik memilah UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi ini jadi objek riset karena UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi yakni satu diantara Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi anak berkebutuhan istimewa dan pula mendapatkan atensi dari pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Disisi lain sekolah ini pula tercantum sekolah yang memiliki mutu yang baik, yang dibuktikan dengan sarana prasarana yang memadai.

Riset kualitatif yakni studi yang bersifat deskriptif dengan kecenderungan mengenakan analisis. Proses studi dan makna lebih diutamakan dalam studi ini. Studi kualitatif menganalisis dan menafsirkan suatu realitas, gejala serta peristiwa bersumber pada apa yang terjalin sehingga jadi bahan kajian buat ditindaklanjuti. (Fatah, 2023). Riset deskriptif kualitatif ini digunakan buat mengenali cerminan menimpa pengelolaan dana BOS secara akuntabilitas serta transparansi di UPT SLB E Negara Pembina Tingkat Provinsi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Informasi primer yang bersumber dari data secara langsung yang ditemui dilapangan semacam hasil wawancara langsung di UPT SLB E Negara Pembina Medan. Informasi sekunder diperoleh dari pihak kedua, informasi ini tidak langsung diperoleh periset dari subyek penelitiannya. Semacam informasi dokumentasi pada UPT SLB E Negara

Pembina Medan. Metode pengumpulan informasi yang digunakan periset buat mendapatkan informasi dengan melaksanakan wawancara serta dokumentasi.

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil

1. Wawancara Bersama Kepsek

Kepsek (KS) menyatakan bahwa perannya adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dana BOS dengan berkolaborasi dengan manajemen BOS sekolah. Adapun bukti pernyataan yang disampaikan oleh beliau ialah sebagai berikut ini.

“Sebagai Kepsek, tentu saya harus mampu memastikan apakah dana BOS bisa dilaksanakan secara transparan lalu apakah bisa dilaksanakan secara akuntabilitas, yaitu dengan cara saya bersinergi dengan manajemen BOS yang ada di sekolah untuk bisa memastikan seluruh program sekolah yang sudah dituangkan dalam RKAS. Semuanya tertuang dan ditampung di dalam dana BOS. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah sangat transparansi sebenarnya pengelolaan dan pelaksanaan ataupun pelaksanaan atau realisasi dana BOS. Karena setiap bulan itu dana BOS sudah dicairkan di bank. Jadi kalau misalnya contoh seperti ini, kalau kita mau ngambil dana BOS bulan Juni atau bulan Mei ini maka BKU Buku Kas Umum di bulan April itu sudah harus selesai.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa prosesnya dimulai dengan memastikan bahwa semua program sekolah tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan kemudian diusulkan untuk ditampung dalam dana BOS.

KS menjelaskan bahwa langkah-langkah konkrit yang telah diambil sekolah meliputi rapat dengan guru-guru untuk mendiskusikan kebutuhan sekolah dalam berbagai aspek, yang kemudian dituangkan dalam RKAS. Pada tahap pengusulan dana BOS, semua kebutuhan yang diusulkan berasal dari musyawarah guru-guru dan ditampung dalam program sekolah yang sesuai dengan dana BOS. Kemudian, KS menyatakan bahwa meskipun belum ada penerapan sistem informasi akuntansi, namun hal ini merupakan kebutuhan yang diakui oleh sekolah. Adapun pernyataan yang diberikannya ialah sebagai berikut ini.

“Nah, sejauh ini kita belum. Tapi kalau rencana bukan hanya rencana sih, itu kebutuhan. Kebutuhan di sekolah dan kita sudah minta. Karena kita gak ada SDM khusus yang menangani akuntansi secara khusus dalam pengelolaan dana BOS. Jadi guru yang kita latih untuk bisa buat BKU, untuk bisa buat laporan dana BOS, dan seterusnya. Jadi gak ada tenaga ahli khusus atau akuntan yang ada di sekolah kita untuk bisa membantu kita di dalam pengelolaan dana BOS ini. Dan sebaiknya sih setiap sekolah punya itu. Nah, tapi karena tenaga penunjangnya gak ada, maka tenaga yang ada kita latih. Jadi yang latih profesional atau? Yang melatih biasanya kan ada pertemuan di Dinas Pendidikan. Ada BIMTEK namanya, Bimbingan Teknis kepada Bendahara BOS. Bagaimana pengelolaan dana BOS yang baik, bagaimana buat laporan yang baik, bagaimana menggunakan aplikasi dana BOS. Karena di masing-masing sekolah itu hanya ada satu aplikasi untuk dana BOS. Jadi itu hanya ada di Bendahara, saya sendiri gak punya sebagai Kepsek. Nah, jadi Bendahara yang ngerti, yang tahu bagaimana meng-input realisasi pelaksanaan dana BOS. Nah, saya sebagai Kepsek hanya memonitor apakah program yang sudah kita tuangkan di RKS itu sudah dilaksanakan atau belum.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KS menyebutkan bahwa saat ini tidak ada SDM khusus yang menangani akuntansi dalam pengelolaan dana BOS, namun guru-guru dilatih untuk membuat laporan dan BKU. Meskipun demikian, KS menyatakan perlunya tenaga ahli khusus atau akuntan di sekolah untuk membantu dalam pengelolaan dana BOS.

Dari hasil wawancara dengan Kepsek, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan dana BOS di sekolah telah melibatkan upaya untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan dana tersebut. Meskipun belum ada penerapan sistem informasi akuntansi, namun kesadaran akan pentingnya hal ini telah diakui, dan langkah-langkah sedang diambil untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan dana BOS.

2. Wawancara Bersama Bendahara BOS

BD menjelaskan bahwa proses pengelolaan dan pelaporan dana BOS dimulai dengan rapat-rapat di sekolah sebelum tahun anggaran yang akan datang. Dalam rapat ini, semua pihak terlibat, termasuk kepsek, PKS, perwakilan guru, orang tua, dan komite. Mereka merumuskan prioritas kegiatan dan kebutuhan untuk tahun anggaran tersebut. Adapun pernyataan yang disampaikan ialah sebagai berikut ini.

Transparansi berarti saat kita membuat rumusan kebutuhan-kebutuhan untuk sekolah bersama beberapa pihak seperti orang tua, perwakilan komite, guru, dan dari PKS. Setiap pihak yang hadir dalam rapat mengetahui apa yang telah dirumuskan. Jika ada keputusan yang dibuat dalam rapat namun tidak dilaksanakan, ini berarti mereka dapat mengontrol penggunaan dana sebagai bentuk transparansi.

BD menegaskan bahwa transparansi dicapai melalui partisipasi semua pihak dalam proses perencanaan. Jika ada ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dalam rapat dengan apa yang dilaksanakan, hal itu dapat menjadi kontrol bagi BD. Dengan demikian, semua keputusan dan tindakan terkait dana BOS dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pernyataan yang disampaikan ialah sebagai berikut ini.

"Iya, tantangan terbesar yang pertama itu memang aplikasi-aplikasinya itu setiap hampir ya untuk tahun 2024 aja hampir setiap bulan itu ada upgrade-upgrade artinya sekolah harus punya perangkat yang paling terbaru kalau perangkatnya ketinggalan pasti aplikasinya tidak bisa diakses di laptop itu yang pertama. Aplikasinya masih terus upgrade-upgrade terus yang kedua mungkin karena sistemnya itu ada pihak-pihak tertentu yang juga maksudnya begini pihak-pihak tertentu juga yang bertanggung jawab artinya yang menjadi kontrol sekolah untuk kelancaran dana bos jadi ada beberapa kegiatan yang memang kita harus menunggu harus menunggu konfirmasi."

BD mengidentifikasi tantangan utama dalam mengelola dana BOS, yaitu perubahan aplikasi secara terus-menerus dan ketergantungan pada pihak lain untuk konfirmasi atau persetujuan tertentu. Untuk mengatasi tantangan ini, BD menyebutkan perlunya pembaruan perangkat secara berkala dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait.

BD menyebutkan bahwa menerapkan sistem informasi akuntansi di sekolah dapat menambah beban kerja bagi guru yang juga merangkap sebagai bendahara. Namun demikian, dia mengakui bahwa sistem ini dapat mempermudah proses pengelolaan dana BOS. Tantangan yang mungkin dihadapi termasuk kesulitan dalam mengatur waktu antara tugas mengajar dan tugas administratif serta kebutuhan akan sosialisasi yang memadai untuk memastikan penggunaan sistem ini secara efektif.

3. Wawancara Bersama Guru

Berdasarkan hasil wawancara bersama guru UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi mengungkapkan bahwa penggunaan dana BOS sangat mempengaruhi kondisi pembelajaran dan fasilitas di sekolah. Dana BOS merupakan sumber dana yang penting untuk meningkatkan sarana-prasarana dan mendukung upaya pembelajaran. Ini

menunjukkan kesadaran akan pentingnya alokasi dana BOS untuk mendukung pengembangan sekolah secara keseluruhan.

Guru tersebut meyakini bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BOS memiliki dampak positif pada kualitas pendidikan di sekolah. Dengan adanya transparansi, orang dapat lebih percaya dan yakin terhadap penggunaan dana tersebut. Ini mencerminkan pentingnya kepercayaan dan keyakinan dalam memastikan dana BOS digunakan dengan tepat sesuai peruntukannya. Adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut ini.

"Ya iyalah, dengan transparansi kan orang bisa lebih percaya, lebih yakin, jadi orang tidak berpikir-pikir."

Selain itu, guru tersebut menjelaskan bahwa peran mereka dalam memastikan penggunaan dana BOS yang efektif adalah dengan memberikan saran dan masukan kepada sekolah atau pihak lain yang mengelola dana BOS. Mereka juga bertanggung jawab untuk memantau realisasi dari rencana-rencana penggunaan dana BOS tersebut. Hal ini menunjukkan kesadaran guru akan pentingnya peran mereka dalam mendukung efektivitas penggunaan dana BOS untuk kebutuhan pembelajaran di kelas. Adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut ini.

"Kalau saya sebagai guru, paling yang memberikan saran dan masukan kepada sekolah atau pihak lain yang mengelola dana BOS, paling itulah yang bisa saya lakukan, memberikan saran dan masukan. Sekalian semungkin melihat realisasi dari rencana-rencana penggunaan dana BOS itu sendiri."

Berdasarkan wawancara dengan guru UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS sangat berdampak pada kondisi pembelajaran dan fasilitas di sekolah. Dana BOS dianggap sebagai sumber dana yang krusial untuk meningkatkan sarana-prasarana dan mendukung proses pembelajaran. Guru tersebut juga meyakini bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BOS berdampak positif terhadap kualitas pendidikan sekolah, karena dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap penggunaan dana tersebut. Selain itu, peran guru dalam memastikan penggunaan dana BOS yang efektif adalah dengan memberikan saran, masukan, dan memantau realisasi dari rencana penggunaan dana tersebut. Kesadaran akan pentingnya kontribusi guru dalam mendukung efektivitas penggunaan dana BOS untuk kebutuhan pembelajaran di kelas sangatlah jelas dari pernyataan yang disampaikan. Dari hasil wawancara dengan kesek, bendahara dana BOS, dan guru, tergambar gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan dana BOS di sekolah ini. Kepek menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS, dengan memastikan bahwa setiap program sekolah direncanakan secara cermat dan terdokumentasi dalam RKAS. Dia juga menegaskan bahwa proses pencairan dana BOS dilakukan sesuai dengan realisasi program yang telah terlaksana. Bendahara dana BOS menjelaskan bahwa proses pengelolaan dana melibatkan rapat-rapat di sekolah untuk menentukan prioritas penggunaan dana, serta pelaporan rutin melalui aplikasi RKAS.

Namun, mereka juga menghadapi tantangan terkait upgrade aplikasi dan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan, serta adanya LSM yang meminta sumbangan. Meskipun demikian, mereka berhasil mengatasi masalah tersebut dengan menganggarkan perangkat yang diperlukan dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait. Guru menyatakan bahwa penggunaan dana BOS telah berdampak positif pada kondisi pembelajaran dan fasilitas di sekolah ini. Mereka juga meyakini bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BOS memberikan kepercayaan yang lebih pada proses pendidikan.

Selain itu, guru juga berkontribusi dengan memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan dana BOS, serta memantau realisasi rencana penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, wawancara dengan ketiga narasumber tersebut menggambarkan komitmen dan inisiatif telah diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini melalui pengelolaan dana BOS.

Pembahasan

Menurut Pasal 1 Ayat(1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Dana Bantuan operasional sekolah(BOS) ialah dana yang digunakan sangat utama buat mendanai belanja nonpersonalia buat satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan guna mendanai sebagian kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021, n. d.)

Bantuan operasional sekolah maupun BOS ialah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah buat kepentingan nonpersonalia. Dana BOS diberikan bersumber pada jumlah siswa yang dimiliki sesuatu sekolah. Disaat ini, dana BOS dipecah jadi 2, yakni BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan dana BOS yang berasal dari pemerintah wilayah. (Yanti, 2021). Program Bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang membiayai bayaran operasional satuan pembelajaran bawah yang tidak bisa ditukar buat melakukan program harus belajar. Tujuan dari program BOS merupakan buat membagikan keringanan untuk orang tua siswa dalam membiayai pembelajaran nasional 9 tahun yang bermutu untuk anak bangsa, buat partisipan didik SD sampai SMP diberikan pembelajaran free terpaut bayaran operasional sekolah, tidak memungut pembayaran sekolah kepada siswa miskin dari seluruh wujud pungutan. (Huliawati, 2021).

Komponen utama penganggaran adalah perencanaan, operasional dan sumber daya, keuangan (budgeting), distribusi dan koordinasi. Jadi jika UPT SLB-E relevan dengan kebutuhan Negeri Pembina di tingkat provinsi, maka sebenarnya sekolah tersebut berupaya menyiapkan anggaran yang adil dan tepat. Hal ini terlihat jelas dari sekolah belajar mandiri, khususnya kelompok BOS sekolah melalui RKAS, yang perencanaannya sudah ada pada tahap persiapan, dengan penilaian kebutuhan masing-masing pihak terkait dengan situasi dan sekolah di wilayah tersebut. anggaran yang mencakup orang lain atau seluruh bagian sekolah. Penerapan pengelolaan keuangan BOS tingkat provinsi di UPT SLB-E Negeri Pembina didasarkan pada dua faktor yaitu pendapatan dan belanja.

Pendapatan dari pusat atau negara datang dalam bentuk bantuan BOS tergantung pada jumlah siswa yang terdaftar di DAPODIK, sedangkan pengeluarannya dilakukan melalui seluruh bantuan yang disesuaikan dengan anggaran ARKAS/RKAS. Dana tersebut digunakan untuk menunjang program pendidikan dan pelatihan, administrasi, sarana dan prasarana, kegiatan khusus, dan lain-lain. Pelaporan pengeluaran CSF secara online melalui aplikasi ARKAS. Laporan yang disiapkan didukung dengan laporan keuangan, SPJ BOS, data yang digunakan dan dokumen pendukung. Semua informasi tersebut dari wawancara dengan kepala sekolah, bendahara danguru. Pada tahap akhir, aplikasi MARKAS menjadi satu-satunya aplikasi Kementerian Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab mengelola dana BOS. (Waluyo et al., 2023).

Hasil wawancara bersama Kepsek UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam mengelola dana BOS dan pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi. Kepsek tersebut menyadari bahwa ada kendala dalam hal aksesibilitas

teknologi dan kesiapan SDM, tetapi siap untuk mengatasi tantangan ini dengan melakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM serta menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Sekolah tersebut pun berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pendidikan di sekolah.

Perihal ini juga didukung oleh penelitian yang dicoba oleh Amin et al., (2022) yang bertajuk “Akuntabilitas serta Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) Pada Sekolah Bawah di Kecamatan Mataram Tahun 2021” yang melaporkan kalau pengelolaan dana BOS bersumber pada prinsip akuntabilitas serta transparansi telah lumayan baik. Ada pula aspek pendukung pelaksanaan akuntabilitas serta transparansi; (1) keterlibatan stakeholders dalam pengelolaan dana BOS, serta (2) kejelasan ketentuan dalam pengelolaan dana BOS. Sebaliknya aspek penghambat terbentuknya akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana BOS merupakan: (1) minimnya kompetensi SDM, (2) minimnya media publikasi, serta (3) reaksi orang tua yang rendah serta belum maksimal. (Amin et al., 2022).

Selain itu, hasil wawancara bersama Bendahara Dana BOS UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi menyoroti beberapa kendala yang di hadapi dalam pengelolaan dana BOS, terutama terkait dengan keterbatasan teknologi dan kesiapan SDM. Beliau setuju bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pihak sekolah juga akan bekerja sama dengan kepek dan staf sekolah lainnya untuk memastikan bahwa sistem ini diimplementasikan dengan baik dan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengelolaan dana BOS.

Hasil penelitian yang disampaikan oleh bendahara tersebut pun didukung oleh pernyataan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waluyo et al., (2023) yang berjudul “Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Isalm Terpadu Muhammadiyah” yang menyatakan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD IT Muhammadiyah didasarkan pada prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini tercermin dalam perencanaan dana BOS di SD IT Muhammadiyah yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan pedoman teknis. Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kebutuhan prioritas. Dari sudut pandang pengawasan yang baik, ini ditunjukkan oleh hasil audit internal dan eksternal sehingga tidak ditemukan penyalahgunaan dana anggaran. (Waluyo et al., 2023).

Meski guru di yang mengajar dilokasi penelitian sadar akan adanya tantangan dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan akses terhadap teknologi, ia yakin sekolah dapat mengatasi kendala tersebut dengan pelatihan dan dukungan yang tepat. Sebab, guru ini berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS sangat penting untuk memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara maksimal guna meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati et al., (2023) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kolaka Timur” yang menyatakan kalau aspek internal yang pengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana BOS merupakan kompetensi sumber energi manusia berbentuk pengetahuan tentang ketentuan serta konsep pengelolaan dana BOS, keahlian memakai teknologi data, ketertiban, dan integritas personal pengelola. Aspek eksternal berbentuk ketersediaan teknologi yang pengaruhi akuntabiitas pengelolaan dana BOS merupakan teknologi pc, aplikasi program yang gampang diterapkan, jaringan internet yang menunjang pelaporan secara online dan tersedianya teknologi data yang bisa dioperasikan secara berkepanjangan. (Akib et al., 2023).

Sehingga dapat peneliti hasilkan hasil pada keseluruhan penelitian ini ialah bahwa, kesadaran yang kuat dari kepek, bendahara dana BOS, dan guru UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi akan pentingnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan teknologi dan kesiapan SDM, semua pihak terlibat sepakat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi kendala ini. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, diharapkan bahwa sekolah ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pendidikan di lingkungan mereka. Hanya saja, dalam hal tersebut terdapat banyak kendala pada saat implementasi hal tersebut diantaranya ialah sebagai berikut ini.

1. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak aplikasi dan sistem informasi akuntansi yang terus mengalami perkembangan dan upgrade. Namun, hal ini dapat menjadi kendala bagi sekolah, terutama jika mereka tidak memiliki akses terhadap perangkat keras atau perangkat lunak terbaru yang dibutuhkan. Keterbatasan perangkat dapat menghambat akses dan penggunaan aplikasi tersebut secara optimal.
2. Penerapan sistem informasi akuntansi membutuhkan kesiapan SDM yang dapat memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan teknis. Guru-guru yang bertanggung jawab untuk mengelola dana BOS mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk dapat menggunakan sistem tersebut secara efektif. Ini memerlukan waktu dan upaya tambahan untuk melatih dan mengembangkan SDM yang sesuai.
3. Implementasi sistem informasi akuntansi tidak hanya memerlukan biaya awal untuk software dan hardware, tetapi juga biaya operasional yang berkelanjutan untuk pemeliharaan, upgrade, dan dukungan teknis. Sekolah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengelola biaya ini, yang mungkin menjadi tantangan terutama bagi sekolah dengan sumber daya terbatas.
4. Terlepas dari kecanggihan sistem informasi akuntansi, masih ada masalah aksesibilitas, paling utama di wilayah pedesaan ataupun terpencil di mana akses internet ataupun infrastruktur teknologi bisa jadi kurang. Hal ini dapat menghambat penggunaan sistem secara efektif oleh sekolah yang berada di lingkungan tersebut.

Dalam hal tersebut, tentu harus melakukan berbagai upaya dalam menghadapi tantangan tersebut. adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut ini.

1. Sekolah dapat melakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam pengelolaan dana BOS dan penerapan sistem informasi akuntansi. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak akuntansi, pengelolaan keuangan, dan pemahaman yang lebih baik tentang proses pelaporan.
2. Sekolah dapat menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti perusahaan teknologi atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan akses lebih mudah terhadap teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan. Ini dapat termasuk program kerja sama untuk menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak dan juga untuk melatih mereka guru-guru dan staf sekolah.
3. Sekolah dapat mempertimbangkan penggunaan sistem informasi terpadu yang mencakup manajemen keuangan, akademik, dan administratif secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan semua aspek ini ke dalam satu platform, sekolah dapat memastikan konsistensi data dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.
4. Komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang erat antara semua pihak terkait, termasuk kepek, bendahara, guru, orang tua siswa, dan komite sekolah, sangat penting

untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Pertemuan rutin, laporan berkala, dan forum diskusi dapat menjadi sarana untuk memastikan semua pihak terlibat dan terinformasi.

V. KESIMPULAN

Hasil riset ini menampilkan kalau artinya dalam tingkatkan akuntabilitas dan transparansi saat mengelola uang BOS di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi. Kepsek, bendahara dana BOS, dan guru telah menunjukkan kesadaran yang kuat akan tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan teknologi dan kesiapan SDM. Namun, mereka juga menegaskan komitmen mereka untuk mengatasi kendala ini dengan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang tepat. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, diharapkan bahwa sekolah ini dapat mencapai tujuan mereka untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pendidikan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan pertama). CV. Harfa Creative.
- Agustini, E., Zulkifli, Z., & Rosalin, F. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dana Bantuan Sekolah (BOS) Sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada SMP Taman Siswa Banyuasin 1). *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 7(1), 1–10.
- Akib, M., Natsir, M., & Indrijawati, A. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah menengah pertama di kabupaten kolaka timur. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 38–51.
- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kecamatan mataram tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166–174.
- Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 203–209.
- Batubara, T. B. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pada Perum Perumnas Project Sukaramai Kota Medan. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(2), 29–37.
- Damayanti, A. (2023). Peranan sistem informasi akuntansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20(3), 343–350.
- Hakiki, A., Yusnaini, Y., & Khamisah, N. (2021). Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi pada UMKM di Desa Kerinjing, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(2), 125–132.
- Harmain, H., Nurlaila, N., Safrida, L., Sufritayati, S., Alfurkaniati, A., Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, J., & Nurwani, N. (2019). *Pengantar Akuntansi I*.
- Harnanto. (2019). *Dasar-Dasar Akuntansi*. ANDI.
- Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). *Ilmu pendidikan: konsep, teori dan aplikasinya*.

- I Y Permata. (2023). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos terhadap RKAS SMP Sunan Kalijaga. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Indonesia Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (2020).
- Lia Wanadriani Santosa. (2021). Kolaborasi pemerintah dan industri dibutuhkan untuk dukung pendidikan. <https://www.antaraneews.com/berita/2575045/kolaborasi-pemerintah-dan-industri-dibutuhkan-untuk-dukung-pendidikan>
- Lidia P. Koloay. (2015). Sistem Informasi Akuntansi. Lingga Jaya.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). ANDI.
- Nurhayati, Arifuddin, Mulyati Akib, Intihanah, La Ode Suriadi, Intihanah, & Aini Indrijawati. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kolaka Timur. JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan), 8(1).
- Nurul Widiana Amin, Eni Indriani, & Yusli Mariadi. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah Dasar di Kecamatan Mataram Tahun 2021. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(1), 166–174. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.193>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor I Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Putri, N. A., & Rahmanida, S. F. (2023). Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Transformasi Bisnis Pt Pertamina. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 1(5), 142–150.
- Rahma, T. I. F., & Hasibuan, N. F. A. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus Pada 3 Masjid Di Kota Medan). Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA), 4(1), 1591–1603.
- Riska Huliawati. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 145/VII Lubuk Resam IV Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rochendi, T., Regina, T., & Surya, V. P. D. (2022). Sistem dan Prosedur Penggunaan Cash Card Sebagai Pembayaran Operasional Kas Kecil pada PT. Pertamina (PERSERO). KOMPLEKSITAS: Jurnal Ilmiah Manajemen , Organisasi dan Bisni, 11(2), 69–74.
- Rosdiana, R. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana BOS. COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(1), 185–193.
- S F Harahap. (2021). Akuntansi Keuangan Sektor Publik: Teori dan Praktik. Kencana Prenada Media Group.
- Sistem Informasi Akuntansi, Citapustaka Media (2015).
- Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi , ANDI (2017).
- Sukomardojo, T., Akbar, R. A., Aripin, Z., Amin, F., & Fatmawati, E. (2023). Transformasi Digital dalam Administrasi Publik dan Dampaknya terhadap Kesadaran Politik Ekonomi: Analisis Pendekatan Kualitatif dalam Connected Community. Ministrare: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah, 5(2), 196–204.
- Supriyanto, A. (2022). Pengelolaan Dana BOS Transformasi: Menuju Pendidikan Berkualitas dan Berkeadilan. Kencana Prenada Media Group.

-
- Syabri, B. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Waluyo, T., . H., & . S. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>
- Wulan Asih Munazriyanti Dalimunthe. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN 014746 Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Di Smp N 3 Sukawati Dalam Program Rkas. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 139–151.